

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIKDI DESA PUNGUT HILIR, KABUPATEN KERINCI

Vivi Herlina

STIA NUSA Sungai Penuh
Email: viviherlina124@gmail.com

Submission: 23-08-2017, Reviewed: 31-08-2017, Accepted: 10-09-2017
<https://doi.org/10.22216/jit.2017.v11i3.2069>

Abstract

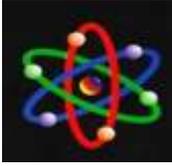
Community participation is important to achieve a successful physical development. Some developments are not appropriate with social need and there's no development even distribution in Desa Pungut Hilir, Kabupaten Kerinci. This study aims to analyze community participation in physical development in Desa Pungut Hilir, Kabupaten Kerinci. This study used a qualitative approach and purposive sampling method. There are five analysis indicators using in this study: initiative, finance, decision making, mass mobilization, and development activity. As the result of the study, Desa Pungut Hilir society have been involved in the development process like socialization activity. But there were many people whom don't want to participate in the development process..

Keywords: *community participation, physical development, purposive sampling method*

Abstrak

Peran masyarakat untuk memajukan pembangunan fisik sangat penting sekali. Banyaknya pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak ada pemerataan dalam pembangunan di Desa Pungut Hilir, Kabupaten Kerinci. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Pungut Hilir, Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode purposive sampling. Terdapat lima indikator analisis partisipasi yang digunakan, yaitu indikator prakarsa/inisiatif, pembiayaan, pengambilan keputusan, mobilisasi tenaga, dan pelaksanaan pembangunan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pungut Hilir telah diikutsertakan dalam proses pembangunan desa dalam bentuk pertemuan desa. Namun, terdapat beberapa warga yang tidak ingin ikut terlibat dalam proses pembangunan tersebut.

Kata Kunci: *Peran masyarakat, pembangunan fisik, metode purposive sampling*



PENDAHULUAN

Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Desentralisasi merupakan penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom, sedangkan Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi daerah berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat kabupaten/kota. Namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa.

Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui peningkatan kualitas hidup, ketrampilan dan prakarsa masyarakat (Adisasmita, 2006).

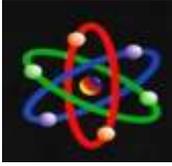
Dalam pembangunan desa, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena dengan adanya partisipasi masyarakat maka tujuan dari

pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan baik dalam pembangunan fisik maupun nonfisik.

Pembangunan fisik yang dimaksud adalah pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan di Desa Pungut Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci, Setiap kegiatan atau rentetan dari usaha proses pembangunan harus dikembangkan untuk meningkatkan nilai-nilai dan objek yang dilaksanakan agar dapat berubah kearah yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu bentuk dukungan masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencanaan, ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat diukur dengan kemauan rakyat untuk ikut bertanggungjawab dalam pembiayaan pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah (Conyers, 1994).

Untuk mendapatkan hasil pembangunan daerah yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, karena masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada di wilayahnya. Disamping itu dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya, sehingga mereka dapat merasa ikut bertanggungjawab dan merasa memiliki program-program



pembangunan yang jelas akan sangat menguntungkan bagi pelaksanaannya.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam semua tahapan proses pembangunan adalah untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat desa dan apa yang dapat dibangun di desa mereka. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa sangat menentukan suksesnya pembangunan di desa terutama di segi pembangunan fisik desa karena dengan berperannya masyarakat kita bisa mengetahui potensi masyarakat dan apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga dengan adanya hal tersebut pembangunan dapat dijalankan sesuai kebutuhan dan tidak asal membangun.

Sesuai dengan pengamatan awal peneliti, untuk kategori desa maju dan desa tertinggal, pemberian partisipasi masyarakat lebih cenderung memberikan materi (uang), dan tenaga. Namun dipihak lain, partisipasi masyarakat ini, tidak selamanya tinggi, adakalanya masyarakat dirasa sangat kurang berpartisipasi, baik itu dalam bentuk tenaga, pikiran, waktu dan materi.

Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Pungut Hilir, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci; dari tahapan sosialisasi hingga tahapan pelaksanaan pada kegiatan pembangunan jalan setapak termasuk masih rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat diindikasikan dengan kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam proses sosialisasi, Musdes (Musyawarah Desa) dan pelaksanaannya. Pada kegiatan musyawarah tersebut, rata-rata kehadiran warga masih dibawah 50% dari jumlah warga yang ada itupun yang hadir hanyalah orang-orang yang pandai dalam berbicara. Sedangkan pada tahapan

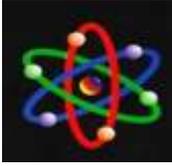
pelaksanaan, ditemukan bahwa masyarakat yang ikut mengerjakan masih menerima upah sesuai dengan Standar Harga Satuan yang berlaku dan juga dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat yang ada di Desa Pungut Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci, tingkat dan bentuk partisipasi berbeda-beda.

Pada Desa Pungut Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci, keterlibatan masyarakat hanya sebatas pelengkap dari proses pembangunan saja, seperti pembangunan jalan setapak dimana masyarakat hanya sebagai penyedia tempat bagi pembangunan sedangkan dalam proses pelaksanaan pembangunan hanya orang-orang tertentu yang berperan aktif seperti aparatur desa.

Dengan adanya pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak, sehingga tidak adanya pemerataan dalam pembangunan di Desa Pungut Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci, untuk itulah perlu dilakukan penelitian tentang **“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Pungut Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci”**.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Pungut Hilir, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Tifani Ardilah, Mochamad Makmur, Imam Hanafi dengan judul Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Bareng, Kecamatan



Bareng, Kabupaten Jombang). Metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan wawancara bebas dalam pengambilan data lapangan dan data sekunder (tinjauan literatur dan data yang diambil dari berbagai instansi) dan kemudian hasil penelitian ditulis dalam bentuk kalimat secara deskriptif. Hasil penelitian adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desa yang merupakan administrator pemerintah, administrator masyarakat, dan administrator pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya Kepala Desa yang cakap, jujur, bijaksana dan mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa serta dilengkapi dengan perangkat desa yang berkualitas.

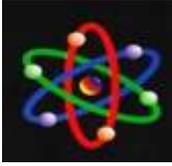
Dari penelitian terdahulu tersebut, peneliti mencoba melakukan Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Pungut Hilir dengan metode *purposive sampling*. Sehingga dapat saling melengkapi dengan penelitian yang telah ada sebelumnya (Ardilah *et al.*, 2007).

Tingkat pendapatan yang dimiliki oleh suatu masyarakat akan mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam pembangunan desa, khususnya dalam bentuk swadaya uang. Seperti yang ada di Desa Bareng dimana tingkat pendapatan masyarakatnya masih rendah, hal ini berpengaruh terhadap tingkat

partisipasi yang mereka berikan dalam bentuk swadaya uang, yang mana tingkat partisipasinya masih rendah atau kurang.

Pendidikan juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dimana masyarakat yang berpendidikan tinggi dapat membantu memudahkan upaya Kepala Desa dalam menyampaikan informasi tentang program pembangunan, dan di sisi lain masyarakat berpendidikan rendah sangatlah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam hal partisipasi dalam bentuk tenaga.

Menurut Hasibuan (Hasibuan, 2013) administrasi berasal dari bahasa Latin, terdiri dari kata "*ad*" artinya intensif dan "*ministrare*" artinya melayani, jadi secara etimologis administrasi berarti layanan secara intensif. Secara etimologis istilah administrasi berasal dari Bahasa Inggris dari kata *administration* yang infinitifnya ialah *administer*. Kata *to administer* diartikan sebagai *to manage* (mengelola) atau *direct* (menggerakkan). Berdasarkan uraian di atas, maka secara etimologis administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan memberikan bantuan dalam mengelola informasi, mengelola manusia, mengelola harta benda ke arah suatu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Administrasi secara umum dapat diartikan sebagai proses kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila diterapkan secara formal dalam organisasi maka proses kerjasamanya tersebut adalah dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi, dan salah satu organisasi yang terbesar adalah negara.



Pengelompokan ilmu administrasi adalah pengelompokan yang sesuai dengan bidang kerjanya, dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Pengelompokan yang bersifat administrasi umum

Yang dimaksud dengan pengelompokan yang bersifat administrasi umum adalah pelayanan administrasi yang diperuntukan untuk masyarakat luas yang bersifat umum dan untuk kepentingan umum, misalnya pelayanan keterangan kesehatan, pelayanan pembuatan paspor, pelayanan pajak kendaraan, pelayanan pembuatan SIM, izin usaha dan lain sebagainya.

- b. Pengelompokan di bidang pembangunan

Pengelompokan di bidang pembangunan maksudnya adalah pelayanan yang ditujukan bagi pembangunan/pendirian badan usaha, sekolah, yayasan, gedung perkantoran, pasar, pembangunan infrastruktur lainnya.

- c. Pengelompokan bersifat sektoral

Pengelompokan bersifat sektoral maksudnya pelayanan administrasi untuk sektor-sektor tertentu, misalnya pelayanan administrasi sektor perhubungan (administrasi pelabuhan, bandara), pelayanan administrasi sektor perpajakan, pelayanan administrasi sektor kesehatan dan lain sebagainya.

- d. Pengelompokan atas dasar pelayanan administratif.

Adalah pelayanan administrasi yang dilakukan suatu unit kerja (perkantoran), berupa urusan tata usaha, kepegawaian,

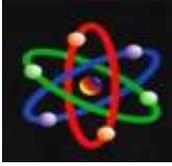
keuangan dan sebagainya yang bersifat pelayanan internal kantor.

Menurut Isbandi(Firmansyah, 2009), partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang solusi alternatif untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Sedangkan menurut Mubyarto dalam Agustinus (Kali, 2011) mendefinisikan partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi masyarakat secara sukarela dalam proses pembangunan sangat diharapkan untuk membantu terwujudnya program pembangunan yang ada di perdesaan tanpa adanya dikorbankan. Karena dengan demikian masyarakat memiliki rasa peduli atas pembangunan yang dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah (Asariansyah, Saleh and Rengu, 2009).

Dari ketiga pengertian di atas dapat disarikan definisi partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) dilakukan secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai



dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu:

- a. Partisipasi uang
Partisipasi uang merupakan bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
- b. Partisipasi harta benda
Partisipasi harta benda merupakan partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
- c. Partisipasi tenaga
Partisipasi tenaga merupakan partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
- d. Partisipasi keterampilan
Partisipasi keterampilan merupakan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemberian dorongan melalui kemampuan atau keterampilan yang dimiliki dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan.
- e. Partisipasi buah pikiran
Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa gagasan atau ide untuk menyusun program maupun untuk melancarkan pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna untuk mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
- f. Partisipasi sosial
Partisipasi sosial merupakan partisipasi yang tumbuh dari diri seorang masyarakat secara sadar.
- g. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan

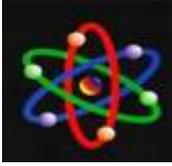
Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang terlebih dahulu ikut serta dalam musyawarah atau diskusi.

- h. Partisipasi refresentatif
Partisipasi refresif merupakan partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan atau mandat kepada seseorang untuk duduk dalam organisasi.

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) adalah partisipasi yang dapat dilihat oleh panca indera partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, dan partisipasi keterampilan.
- b. Partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (tidak berwujud) adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Ross, Murray G., dan B.W. Lappin dalam buku *Community Organization: Theory, Principles And Practise* (Firmansyah, 2009) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya yang menghambat keberhasilan program. Misalnya faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.



Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu :

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada, mereka yang kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada kelompok usia lainnya.

b. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah "di dapur" yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan

Merupakan syarat yang mutlak untuk berpartisipasi, pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, karena pendidikan diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.

d. Pekerjaan dan penghasilan

Pekerjaan dan penghasilan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Dengan adanya pekerjaan dan penghasilan yang baik selain dapat memenuhi kebutuhan tetapi juga dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

e. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya

berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal pada lingkungan tertentu, maka terhadap lingkungan maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

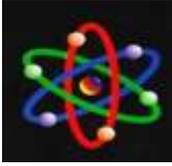
Pembangunan secara sederhana sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, serta tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah pertumbuhan. Terdapat tiga tahapan perencanaan pembangunan:

- a. Perumusan dan penentuan tujuan.
- b. Pengujian atau analisis opsi atau pilihan yang tersedia.
- c. Pemilihan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama.

Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui peningkatan kualitas hidup, ketrampilan dan prakarsa masyarakat (Adisasmita, 2006).

Menurut Gant dalam Suryono (Suryono, 2001), tujuan pembangunan ada dua tahap yaitu:

1. Pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan.



2. Menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu yaitu meneliti suatu objek penelitian dengan mengkaji secara keseluruhan bukan melihat hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini juga, penulis menggunakan beberapa jenis data, yaitu Data Primer, dan Data Sekunder.

Metode Penarikan Informan adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Sudarwan, 2002). Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka diperlukan informan. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Sesuai dengan namanya *purposive sampling* diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa subjek penelitian yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan ini.

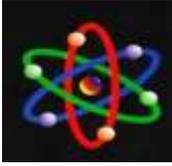
Dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dengan menyertakan informan kunci (*Key Informan*) yang ditetapkan yaitu Kepala Desa Pungut Hilir. Informan Kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan informan biasa adalah yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan.

Dalam menentukan informan yang akan dipakai dalam suatu penelitian, Spardley mengusulkan lima kriteria untuk pemilihan informan yaitu :

1. Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau aktifitas yang menjadi informasi.
2. Subjek yang masih terlibat secara penuh/aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti.
3. Subjek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk diwawancarai.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dipersiapkan terlebih dahulu.
5. Subjek sebelumnya tergolong masih “asing” dengan penelitian, sehingga peneliti merasa tertantang untuk belajar sebanyak mungkin dari subjek yang berfungsi sebagai “guru baru” bagi peneliti.

Dalam penelitian ini peneliti telah menemukan 16 orang informan sebagai informan kunci dan biasa berdasarkan tingkat kejenuhan yang akan diperoleh dalam penelitian nantinya yang akan diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh data lapangan. Informan ini ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai aparatur pemerintah desa dan tokoh masyarakat yang terlibat langsung dengan perencanaan desa.

Mengacu pada penulisan ini yakni mengetahui Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Desa Pungut Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci, maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh lapangan diolah dengan menggunakan interpretatif peneliti untuk mengolah data mentah yang relevan yang diperoleh lapangan kemudian hasil penelitian diuraikan dalam bentuk kalimat bukan angka-angka atau data statistik(Arikunto, 2007).



Untuk menjaga validitas data maka dilakukan triangulasi baik terhadap data, sumber maupun metode. Terdapat tiga macam triangulasi, yaitu (Hadari, 1990).

- a. Triangulasi sumber data.
Pada triangulasi sumber data, data di cek kredibilitasnya dari berbagai sumber data yang berbeda dengan teknik yang sama
- b. Triangulasi teknik pengumpulan data.
Pada triangulasi teknik pengumpulan data, data dicek kredibilitasnya dengan menggunakan berbagai teknik yang berbeda dengan sumber data yang sama.
- c. Triangulasi waktu pengumpulan data.
Pada triangulasi waktu pengumpulan data, data dicek kredibilitasnya dengan waktu yang berbeda-beda namun dengan sumber data dan teknik yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah adalah terlaksananya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk melihat gambaran pembangunan fisik di Desa Pungut Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci dapat dilihat dari sumber pembiayaan pembangunan fisik. Adapun sumber dari pembiayaan pembangunan fisik di Desa Pungut Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci adalah dari pemerintah yaitu dari dana ADD dan selebihnya dari swadaya masyarakat itu sendiri.

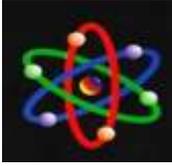
Di Desa Pungut Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci bentuk dari partisipasinya adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi uang yaitu bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat dalam pembangunan fisik, adapun partisipasi yang diberikan adalah berupa uang yang diberikan oleh para pengusaha dan pegawai yang terdapat di Desa Pungut Hilir karena mereka tidak sempat untuk berpartisipasi dalam bentuk tenaga maupun ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi harta benda, sebagian masyarakat Desa Pungut Hilir juga menyumbangkan alat-alat kerja atau perkakas mereka untuk memperlancar pembangunan dan untuk lebih bisa memperoleh hasil yang sesuai keinginan dan maksud dari masyarakat itu sendiri.
3. Partisipasi buah pikiran diberikan pada saat musyawarah saat akan dilaksanakan proses perencanaan pembangunan.

Dalam penelitian ini hanya digunakan satu variabel, yaitu variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Pungut Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.

Indikator-indikator dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik adalah sebagai berikut:

1. Prakarsa/inisiatif, merupakan bentuk partisipasi untuk meningkatkan prakarsa masyarakat, menyarankan strategi pemberdayaan terus menerus, terarah dan terencana dari pemerintah untuk mendorong masyarakat agar

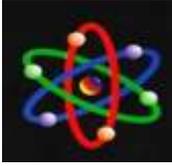


- mampu mengembangkan prakarsanya.
2. Pembiayaan, merupakan bentuk partisipasi untuk meningkatkan pembiayaan masyarakat, strategi yang disarankan adalah mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan pembiayaan kepada pemerintah.
 3. Pengambilan keputusan, merupakan bentuk partisipasi untuk meningkatkan pembuatan keputusan oleh masyarakat, strategi yang disarankan adalah memperkuat posisi modal sosial yang ada di masyarakat dan juga menekankan pada fasilitator untuk terus menerus mengingatkan masyarakat akan pentingnya peranan mereka dalam membuat keputusan.
 4. Mobilisasi tenaga, merupakan bentuk partisipasi dengan menetapkan sanksi yang adil kepada masyarakat yang tidak terlibat aktif dalam memobilisasi tenaga, menghidupkan kembali organisasi kemasyarakatan sebagai sarana untuk memobilisasi tenaga.
 5. Pelaksanaan pembangunan merupakan bentuk partisipasi dengan memberikan pelatihan-pelatihan serta gambaran pelaksanaan pembangunan sejenis ditempat lain sebagai bahan referensi sehingga akan menjadi bahan perbandingan untuk pelaksanaan kegiatan dan masyarakat dipandu dalam kegiatan pembangunan ini.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Pungut Hilir, Kecamatan Air Hangat Timur sudah cukup signifikan karena banyak pembangunan fisik yang dapat

direalisasikan, seperti pembangunan jalan raya, tempat pemandian umum atau MCK, irigasi, penampungan air bersih, penahan tebing, dan sebagainya. Untuk mendapatkan hasil pembangunan yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, dibutuhkan keterlibatan beberapa anggota masyarakat dalam musrenbang (musyawarah rencana pembangunan desa) hingga pelaksanaan pembangunan dan lebih penting lagi pembangunan tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur desa dan beberapa tokoh masyarakat yang terlibat dalam pembangunan fisik di Desa Pungut Hilir, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, dapat diuraikan dalam hasil penelitian ini yaitu:

Indikator Prakarsa/inisiatif yaitu prakarsa/inisiatif yang berarti meningkatkan peran masyarakat untuk ikut terlibat dalam musyawarah atau kegiatan dari awal hingga akhir kegiatan dan masyarakat perlu diberikan pelatihan secara lebih sering dalam kegiatan yang sejenis untuk selanjutnya, masyarakat perlu diberikan kepercayaan yang lebih dalam pembangunan. Berdasarkan indikator penelitian yang pertama yaitu prakarsa/inisiatif dapat diinterpretasikan bahwa antara teori yang menjadi dasar dan hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa/inisiatif adalah bagaimana masyarakat terlibat dalam memberikan buah pikirannya dalam proses pembangunan. Penyaluran ide-ide dan sumbangan pemikirannya dapat disalurkan lewat lembaga-lembaga formal yang ada serta dapat diwujudkan pada berbagai macam kesempatan, seperti melalui pertemuan/rapat, melalui surat/saran dan tanggapan terhadap proses pembangunan. Untuk mengetahui



partisipasi masyarakat di Desa Pungut Hillir dalam pembangunan dengan bentuk ide/pemikiran, maka dapat dilihat pada keikutsertaan dalam mengikuti rapat-rapat dan keaktifan dalam memberi pendapat dan saran dalam pertemuan.

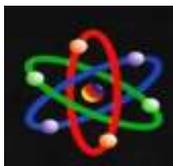
Indikator Pembiayaan berarti meningkatkan pembiayaan masyarakat, strategi yang disarankan adalah mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan pembiayaan kepada pemerintah. Berdasarkan indikator kedua dapat diinterpretasikan bahwa pembiayaan baik berupa uang ataupun dari swadaya masyarakat menunjukkan suatu bentuk bagian partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ataupun kesadaran masyarakat bahwa dalam suatu pembangunan membutuhkan dana yang cukup, dan masyarakat dalam memberikan sumbangan bukan karena adanya paksaan dari pemerintah atau dari pihak lain tetapi karena adanya kesadaran untuk membangun daerahnya.

Indikator Pengambilan Keputusan yaitu pengambilan keputusan berarti meningkatkan pembuatan keputusan oleh masyarakat, strategi yang disarankan adalah memperkuat posisi modal sosial yang ada di masyarakat dan juga menekankan pada fasilitator untuk terus menerus mengingatkan masyarakat akan pentingnya peranan mereka dalam membuat keputusan. Berdasarkan hasil wawancara pada indikator ketiga tentang pengambilan keputusan dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat berhak untuk ikut dan terlibat dalam pembangunan terutama dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah bukan keputusan sendiri, serta adanya keterbukaan dan akuntabilitas antara pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan pembangunan agar pembangunan yang diharapkan dapat

berlangsung efektif dan efisien serta sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, dalam pengambilan keputusan seharusnya menggunakan kebijakan dalam pengambilan suatu keputusan dari musrenbang (musyawarah rencana pembangunan desa) antara aparat desa dan masyarakat yang telah diterapkan sebelum pembangunan dilaksanakan.

Indikator mobilisasi tenaga berarti meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan dengan menetapkan sanksi yang adil kepada masyarakat yang tidak terlibat aktif dalam memobilisasi tenaga, menghidupkan kembali organisasi kemasyarakatan sebagai sarana untuk memobilisasi tenaga. Dari indikator keempat tersebut dapat diinterpretasikan antara teori yang menjadi dasar dengan hasil penelitian bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bukanlah merupakan paksaan, akan tetapi kerelaan untuk terlibat. Kerelaan itu sendiri muncul dari kesadaran bahwa keterlibatan mereka dalam bentuk partisipasi tenaga itu adalah suatu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan yang diharapkan, serta dengan menetapkan sanksi yang adil kepada masyarakat yang tidak terlibat aktif dalam memobilisasi tenaga, agar untuk kedepannya masyarakat dapat merasa diri mereka sangatlah penting dalam pembangunan yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain partisipasi masyarakat akan meningkat seiring dengan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan disekitarnya.

Indikator pelaksanaan pembangunan yaitu pelaksanaan berarti bahwa masyarakat ikut serta melaksanakan langkah-langkah yang telah



diambil dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan dengan memberikan pelatihan-pelatihan serta gambaran pelaksanaan pembangunan sejenis ditempat lain sebagai bahan referensi sehingga akan menjadi bahan perbandingan untuk pelaksanaan kegiatan dan masyarakat dipandu dalam kegiatan pembangunan ini. Dari indikator kelima tersebut dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat tidak begitu dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Pungut Hilir karena adanya pembangunan yang belum dilaksanakan karena keterbatasan dana sementara pembangunan fisik yang benar-benar dibutuhkan tidak diperbaiki, seharusnya pembangunan diutamakan yang lebih diperlukan daripada yang tidak terlalu diperlukan.

SIMPULAN

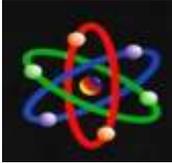
Berdasarkan kelima indikator analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Pungut Hilir, yaitu indikator prakarsa/inisiatif, pembiayaan, pengambilan keputusan, mobilisasi tenaga, dan pelaksanaan pembangunan, bahwa masyarakat telah dilibatkan dalam proses pembangunan fisik sampai pada tahap pelaksanaan pembangunan hanya saja masih banyak masyarakat yang tidak mau ikut berpartisipasi karena mereka tidak mengerti akan pentingnya keterlibatan mereka dan teknik atau metode dalam pelaksanaan pembangunan fisik tersebut.

Dari hasil penelitian tentang Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Pungut Hilir, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, masyarakat telah dilibatkan dalam proses pembangunan fisik sampai pada

tahap pelaksanaan pembangunan hanya saja masih banyak masyarakat yang tidak mau ikut berpartisipasi karena mereka tidak mengerti akan pentingnya keterlibatan mereka dan teknik atau metode dalam pelaksanaan pembangunan fisik tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat yang dilakukan dengan pelatihan, pendidikan dan stimulasi kegiatan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006) *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ardilah, T. *et al.* (2007) 'Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)', 2(1), pp. 71–77.
- Arikunto (2007) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka cipta.
- Asariansyah, M. F., Saleh, C. and Rengu, S. P. (2009) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), pp. 1141–1150.
- Conyers, D. (1994) *Partisipasi Politik Dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Firmansyah, S. (2009) *Partisipasi Masyarakat*. Available at: <https://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>.
- Hadari, N. (1990) *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, M. (2013) *Manajemen Sumber*



- Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kali, A. (2011) 'Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Dan Pembangunan PLTMH Di Paneki Desa Pombewe Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi', *Mektek*, XIII(3), pp. 161–168.
- Sudarwan, D. (2002) *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suryono, A. (2001) *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Press.